

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM DESA MANDIRI ENERGI DI DESA KUJAU KECAMATAN BETAYAU KABUPATEN TANA TIDUNG**

## **(Studi Kasus Kelompok Tani Ternak Mandiri di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung)**

**Tiara Mentari<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat Desa Kujau dalam program desa mandiri energi yang diadakan di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung.*

*Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, yaitu pengumpulan data dengan melalui studi kepustakaan, dokumen dan hasil-hasil penelitian serta melalui lembaga-lembaga terkait dengan masalah yang diteliti dan mengadakan pengamatan langsung objek yang diteliti dengan menggunakan teknik wawancara.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri energi ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya keaktifan yang mereka tunjukkan baik itu pada proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan kegiatan, hingga evaluasi kegiatan, sehingga menyebabkan target yang diharapkan dalam program ini belum tercapai.. Adapun untuk pemanfaatan kegiatan maka sudah pasti masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan program ini seperti sebagaimana seharusnya, dan pada tahap akhir yaitu evaluasi kegiatan merupakan saat dimana pemerintah dan masyarakat saling bertukar pikiran untuk menilai perkembangan program yang sedang dilaksanakan dan membantu menemukan program-program lain yang dibutuhkan masyarakat.*

***Kata Kunci :*** *Partisipasi Masyarakat, Program Desa Mandiri Energi, Biogas, Kabupaten Tana Tidung*

### **Pendahuluan**

#### ***Latar Belakang***

Penggunaan energi secara tidak terbatas akan mempercepat habisnya sumber energi sehingga saat ini pemerintah gencar melakukan kampanye hemat energi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas selalu dibatasi dengan ketersediaan sumber daya untuk memenuhinya.

Energi yang paling banyak digunakan untuk aktifitas manusia adalah energi minyak bumi dan energi listrik. Energi minyak bumi yang banyak digunakan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: tiaramentari92@gmail.com

dalam kehidupan sehari-hari adalah minyak tanah, bensin, dan solar. Pada saat ini perubahan harga energi minyak bumi sangat berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Kenaikan harga minyak bumi menjadi masalah bagi pemerintah karena akan menambah biaya subsidi pemerintah.

Sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak dengan mengembangkan sumber energi pengganti yang ramah lingkungan dan terbarukan. Salah satu jenis bahan bakar pengganti yang dimaksud adalah bioenergi. Bioenergi selain bisa diperbaharui bersifat ramah lingkungan, dapat terurai, mampu mengurangi efek rumah kaca dan terus-menerus dapat digunakan karena bahan baku cukup terjamin.

Bahan baku bioenergi dapat diperoleh dengan cara sederhana yaitu melalui budidaya tanaman penghasil biofuel dan memanfaatkan limbah yang ada disekitar kehidupan manusia. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku bioenergi. Pengembangan bioenergi sebagai sumber energi pengganti sangat cocok digunakan karena didukung oleh ketersediaan lahan yang mencukupi untuk membudidayakan tanaman dan ternak penghasil biofuel.

Indonesia memiliki sumber daya lahan yang sangat luas untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian. Kondisi ini memungkinkan untuk pengusaha berbagai jenis tanaman, termasuk komoditas penghasil bioenergi. Dan beberapa bahan baku bioenergi adalah kelapa sawit, sagu, kelapa, ubi kayu, jarak, agar, tebu, jagung dan limbah peternakan. Krisis energi yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia ini memaksa kita untuk mencari dan menemukan solusi terbaik untuk mengatasinya.

Menyikapi persoalan tersebut, diperlukan suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia yang kurang terjangkau dalam aspek pemenuhan energi. Salah satunya adalah dengan menerapkan program desa mandiri energi.. Desa mandiri energi adalah desa yang masyarakatnya memiliki kemampuan memenuhi lebih dari 60% kebutuhan energi (listrik dan bahan bakar) dari energi terbarukan yang dihasilkan melalui pendayagunaan potensi sumber daya setempat.

Salah satu desa di Kecamatan ini yaitu Desa Kujau ternyata menyimpan potensi dalam pengembangan biogas. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan fakta yang ada dilapangan bahwa sejak tahun 2011 di Desa Kujau tepatnya di daerah trans kujau telah dirintis program Desa Mandiri Energi. Desa yang jarak tempuhnya sekitar 37 KM dari pusat ibukota Kabupaten ini sampai sekarang terus berusaha mengembangkan program ini.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partisipasi Masyarakat***

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 23 Tahun 2013 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum menjelaskan

mengenai pengertian partisipasi masyarakat yaitu keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan pemilu.

Partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat dimaknai sebagai sebuah proses dimana para *stakeholder* saling mempengaruhi dan berbagi kontrol atas inisiatif pembangunan, keputusan, dan juga sumber daya yang akan mempengaruhi mereka (world bank, 1996:3).

Sedangkan partisipasi warga menurut Hetifah Sj.Sumarto (2003:15) adalah proses ketika warga, sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

### ***Tahapan Partisipasi***

Tahapan-tahapan pembangunan dalam kaitan dengan partisipasi dapat dipilah sebagai berikut :

#### 1) Tahap Inisiasi

Partisipasi masyarakat pada tahap ini ada pada tingkatan penuh, berbagi peran atau bersifat konsultatif. Dapat digarisbawahi bahwa masyarakat bisa berperan dalam setiap level dan dapat membuat inisiatif bila diperlukan.

#### 2) Tahap Perencanaan

Merupakan tahapan krusial, karena pada tahap ini kepentingan kota/pemerintah juga perlu dipertimbangkan, khususnya yang menyangkut pembangunan sarana dan prasarana. Pada tahap ini keputusan-keputusan kunci harus diambil dan program harus dapat ditetapkan. Masyarakat dapat memilih untuk aktif terlibat seperti pada pembangunan dengan biaya rendah dan teknologi sederhana (perbaikan jalan setapak, saluran-saluran, dan lain-lain) atau memilih berbagi tanggung jawab (*share control/responsibilities*) atau tidak terlibat sama sekali. Penting diperhatikan pada tahapan ini untuk mempertimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder*.

#### 3) Tahap Desain

Merupakan tahap saat keterlibatan masyarakat tidak begitu penting. Namun dapat ditawarkan pendekatan inovatif yang melibatkan masyarakat bila diyakini ada keuntungan-keuntungan potensial didalamnya, misalnya merencanakan balai pertemuan, dan lain-lain.

#### 4) Tahap Konstruksi

Keterlibatan masyarakat disini sebenarnya kurang penting. Pelibatan hendaknya tidak dilihat sebagai rasionalisasi penggunaan tenaga murah. Pada beberapa kasus proyek pelaksanaan sebaiknya diambil pemerintah (terutama prasarana yang melibatkan teknologi kompleks). Pelaksanaan proyek fisik dapat diintegrasikan dengan program-program peningkatan ekonomi untuk *small entrepreneurs* atau program *community based organization* (pengumpulan sampah, pengelolaan air bersih, pembuatan bahan bangunan, dan lain-lain) dan program pelatihan ketrampilan.

### 5) Tahap Operasional dan Pemeliharaan

Pada tahapan ini pemerintah dan masyarakat harus berperan aktif sesuai kemampuannya. Pada kasus-kasus tertentu masyarakat dapat menyediakan tenaga kerja atau menyisihkan penghasilan untuk sumbangan perawatan atau menyewa anggota masyarakat untuk mengelola. Ini berarti memasukkan penghasilan ke dalam komunitas (contoh : pengelolaan sampah, perawatan bangunan masyarakat/balai, sekolah, dan lain-lain). Tugas harus jelas, disepakati dan didasarkan atas pengukuran kapasitas masyarakat untuk dapat berperan serta dalam perawatan.

### ***Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat***

Menurut Plumer dalam Suryawan (2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah :

#### a. Pengetahuan dan Keahlian

Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap faktor-faktor dan bentuk dari partisipasi yang ada;

#### b. Pekerjaan Masyarakat

Biasanya orang dengan tingkat tertentu akan dapat lebih meluangkan atau bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;

#### c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf

Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada;

#### d. Jenis Kelamin

Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi karena anggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi atau pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

#### e. Kepercayaan terhadap Budaya Tertentu

Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Adapun Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D (2009:39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

### ***Program Desa Mandiri Energi***

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan dan tata niaga bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksi energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi desa itu sendiri.

Adapun yang dimaksud dengan energi terbaru dan terbarukan sesuai dengan Peraturan Presiden No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dalam pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) yaitu :

- Ayat (3) Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun energi tak terbarukan, antara lain: Hidrogen, Coal Bed Methane, Coal Liquefaction, Coal Gasification dan Nuklir Energi;
- Ayat (4) Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber energi yang secara alami tidak akan habis dapat berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut dan suhu kedalaman laut.

Jadi berdasarkan Peraturan Presiden No 05 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi ini, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Mandiri Energi dibagi menjadi 2 berdasarkan bahan baku yang digunakan yaitu :

1. Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi non pertanian. Model desa mandiri ini mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti panas surya (matahari), air, angin, dan biogas.
2. Desa Mandiri Energi yang berbasis pada sumber energi pertanian. Model Desa Mandiri ini adalah mengusahakan bahan bakar pengganti minyak dengan sumber energi seperti biomassa dan biofuel yang berasal dari hasil pertanian dan hutan.

Adapun keberadaan dari Program Desa Mandiri Energi ini merupakan bentuk nyata dari kebijakan publik. Untuk lebih memahami mengenai kebijakan publik maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian kebijakan publik menurut para ahli.

Menurut Dye dalam buku Agustino (2012:7) kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Lebih lanjut James Anderson dalam buku Agustino (2012:7) mengungkapkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Selanjutnya menurut Samodra Wibawa (2011:1) kebijakan publik adalah keputusan suatu sistem politik untuk/dalam/guna mengelola suatu masalah atau memenuhi suatu kepentingan, dimana pelaksanaan keputusan tersebut membutuhkan dikerahkannya sumber daya milik (semua warga) sistem politik tersebut.

Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas dalam Subarsono (2009:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or no to do*).

Untuk lebih memahami mengenai kebijakan publik, maka ada baiknya mengerti mengenai sifat-sifat dari kebijakan publik seperti yang diungkapkan Agustino dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2012:9-10) yang terdiri atas : *policy demands, policy desicions, policy statements, policy outputs, dan policy outcomes*.

a) *Policy demands*

*Policy demands* atau permintaan kebijakan merupakan permintaan / kebutuhan/klaim yang di buat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan. Permintaan tersebut dapat berupa desakan secara umum kepada pemerintah di mana pemerintah harus melakukan sesuatu ataupun berupa usulan untuk bertindak dalam masalah tertentu. Keinginan publik akan menyelesaikan suatu masalah yang mendorong lahirnya suatu kebijakan publik yang dibuat untuk memuaskan warga, paling tidak sebagian, merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mempelajari pembentukan kebijakan publik.

b) *Policy decisions*

*Policy decisions* atau putusan kebijakan adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan. Yang termasuk didalamnya, adalah: keputusan untuk mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang penting.

c) *Policy statements*

*Policy statements* atau pernyataan kebijakan adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang termasuk *policy statements* atau pernyataan kebijakan, adalah : ketetapan legislatif, dekrit dan perintah eksekutif, peraturan administratif, pendapat pengadilan, dan sebagainya. Juga yang termasuk dalam *policy statement* atau pernyataan kebijakan seperti pada pernyataan dan pidato-pidato yang dilakukan oleh pejabat publik yang menandakan maksud dan tujuan dari pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk mewujudkannya. Pernyataan kebijakan kadang-kadang dapat membingungkan, hal ini dapat dilihat dalam konflik yang timbul dalam mengartikan suatu ketetapan politik.

d) *Policy output*

*Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa *output* kebijakan adalah apa yang dikerjakan pemerintah. *Policy output* atau hasil kebijakan biasanya dititik beratkan pada masalah-masalah, seperti : pengumpulan pajak, blockade pada pedagang kaki lima, pembangunan jalan raya, perluasan tempat pembuangan (sampah) sementara dan akhir, atau pengerjaan proyek bantuan luar negeri.

e) *Policy outcomes*

*Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebaikan kesejahteraan di Amerika dapat digunakan sebagai contoh dari konsep ini. Sangat mudah untuk mengukur *output* kebijakan kesejahteraan, misalnya seperti : distribusi sanitasi, jumlah orang yang mendapat bantuan, jumlah lapangan, pekerjaan yang diberikan pemerintah, dan sebagainya

### ***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional merupakan tahapan memberi batasan pengertian dalam penelitian. Dari beberapa pendekatan teori yang disajikan dalam membangun konsep, maka yang dimaksud dengan Partisipasi Masyarakat dalam program desa mandiri energi adalah keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan dalam program desa mandiri energi yang mempengaruhi kehidupan mereka, meliputi proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil kegiatan dan evaluasi kegiatan sehingga peningkatan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sesuai amanat undang-undang dapat tercapai.

### ***Metodologi Penelitian***

Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri energi di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, maka jenis penelitian diklasifikasikan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti.

Menurut Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu : 1). Pengumpulan Data, 2). Reduksi Data, 3). Penyajian Data, 4). Verifikasi Data.

### ***Fokus Penelitian***

Dalam penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana

Tidung”, secara implisit dalam penelitian ini akan membahas fokus yang dapat dipergunakan dalam mengukur variabel tersebut yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat dalam program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, meliputi :
  - a. Pengambilan Keputusan
  - b. Pelaksanaan Kegiatan
  - c. Pemanfaatan Hasil Kegiatan
  - d. Evaluasi Kegiatan
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau, Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung

## **Hasil Penelitian**

### ***Pengambilan Keputusan***

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini dapat diartikan sebagai proses penentuan alternatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini khususnya pihak yang terkait mengenai pelaksanaan program desa mandiri energi ini yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung bersama masyarakat agar melakukan musyawarah untuk mendapatkan keputusan terbaik dari berbagai gagasan sudut pandang untuk kepentingan bersama.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini sudah berjalan cukup baik dan ditentukan secara otonom. Karena masyarakat sudah terlibat dalam setiap tahapan yang memang membutuhkan kehadiran mereka. Hal ini bisa dilihat dari kewajiban-kewajiban yang telah mereka jalani atas hak-hak yang diberikan oleh pihak dinas, terkait penentuan lokasi pada saat melakukan pertemuan, penentuan pembagian gas hasil biogas, dan penentuan luas hijauan makanan ternak.

### ***Pelaksanaan Kegiatan***

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Didalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan

Pada tahap ini keterlibatan masyarakat tentunya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena tanpa adanya keikutsertaan masyarakat sebagai pelaksana maka dapat dipastikan program tersebut tidak akan berjalan sebagaimana seharusnya.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari setiap tahapan pelaksanaan yang sudah melibatkan masyarakat. Adapun untuk tahapan yang berhubungan dengan masalah teknis seperti pemasangan instalasi dan pemasangan pipa saluran gas ditangani langsung oleh pihak luar (kontraktor) yang di tunjuk oleh pihak dinas



### ***Pemanfaatan Kegiatan***

Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program Desa Mandiri Energi berbasis biogas ini selain mampu menghasilkan listrik juga menghasilkan pupuk baik itu berupa pupuk padat ataupun cair. Pupuk ini bisa dijual untuk menambah penghasilan masyarakat.

Partisipasi masyarakat terkait pemanfaatan hasil kegiatan sampai saat ini belum berjalan secara maksimal, hal ini terlihat dari belum tercapainya target terhadap pemanfaatan hasil gas dari program biogas itu sendiri.

### ***Evaluasi Kegiatan***

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Sudah seharusnya dalam setiap kegiatan pasti ada yang namanya evaluasi kegiatan, hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk melihat bagaimana berjalannya program tersebut, dan dalam program desa mandiri energi ini ada evaluasi kegiatan yang diadakan pada awal dan akhir tahun, untuk mengetahui bagaimana masyarakat menggunakan pupuk cair dan padat. Adapun pada tahap ini pemerintah akan mendengar keluhan dari warga tentang apa yang perlu diperbaiki untuk keberhasilan program ini.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan ini belum berjalan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari belum adanya peningkatan secara signifikan terhadap pemanfaatan biogas ini sendiri. Dimana seharusnya yang terjadi adalah dengan adanya evaluasi maka masalah-masalah yang ada dapat diidentifikasi, mengetahui seperti apa implementasi program yang dilakukan, dan kemudian pada akhirnya dapat mengatasi masalah. Evaluasi kegiatan yang berjalan secara maksimal jika dikaitkan dengan program biogas ini maka tentunya akan berdampak pada peningkatan pemanfaatan biogas itu sendiri.

### ***Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung*** Kurangny Kerjasama

Kurangny kerjasama yang penulis maksudkan disini adalah mengenai perawatan terhadap hewan ternak dalam hal sapi itu sendiri dan terkait mengenai pemanfaatan biogas. Masyarakat yang sudah lolos dalam bantuan mengenai bantuan ternak terkadang dalam perjalanannya ada beberapa yang kurang bersungguh-sungguh dalam merawat ternaknya. Karena jika sapi tersebut dipelihara dengan baik maka dapat dipastikan proses pengembaliannya juga akan

berjalan dengan lancar sehingga masyarakat lain yang belum bisa mendapatkan bantuan akan bisa menerima bantuan dikesempatan berikutnya.

Karena sukses mengenai pengembangan peternakan merupakan tahap awal yang harus dilewati untuk bisa berpartisipasi dalam program biogas nantinya.

Peran serta dari masyarakat ini tentunya akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila suatu program di tetapkan. Tidak dapat di pungkiri bahwa dalam setiap program yang di buat oleh pemerintah akan ditemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Oleh karena itulah, peran serta masyarakat sangat di butuhkan untuk menjadi landasan pemerintah dalam membuat suatu program yang nantinya diharapkan lebih dapat menyentuh kehidupan masyarakat.

## **PENUTUP**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada pengambilan keputusan dalam program desa mandiri energi sampai saat ini sudah berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari keaktifan masyarakat dan antusiasme yang mereka perlihatkan pada setiap bagian dalam pelaksanaan program Desa Mandiri Energi berbasis biogas ini.
- 2) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada pelaksanaan kegiatan sampai saat ini sudah berjalan dengan cukup baik, terlihat dari kehadiran dan keaktifan masyarakat pada setiap tahapan yang memang membutuhkan kehadiran masyarakat.
- 3) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat pada pemanfaatan hasil kegiatan sampai saat ini belum berjalan secara maksimal, terlihat dari beberapa kepala keluarga yang belum memaksimalkan pemanfaatan biogas. Adapun menurut pengamatan yang dilakukan penulis selama melakukan penelitian hal ini terjadi dikarenakan masih kurangnya rasa peduli dan kebersamaan sehingga menyebabkan rendahnya kerjasama antar masyarakat yang bersangkutan.
- 4) Keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam evaluasi kegiatan sampai saat ini belum berjalan secara maksimal, terlihat dari belum tercapainya target terkait pemanfaatan biogas itu sendiri.
- 5) Faktor penghambat dalam program Desa Mandiri Energi ini terkait mengenai: Kerjasama antar masyarakat dalam kelompok tani itu sendiri untuk bersama-sama mengoptimalkan pemanfaatan bantuan yang diberikan pemerintah terutama mengenai bantuan biogas ini sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka secara umum partisipasi masyarakat dalam program Desa Mandiri Energi di Desa Kujau ini belum berjalan secara maksimal, hal ini bisa dilihat dari pencapaian target penerima manfaat biogas yang berjalan tidak sebagaimana mestinya.

### **Saran**

1. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Tana Tidung sudah seharusnya mengambil langkah tegas dalam menghadapi sikap-sikap warga yang tidak menaati perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan cara menerapkan sanksi sebagaimana yang telah tertulis pada surat perjanjian kerja yang telah ditandatangani pada saat penyerahan bantuan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung terlebih khususnya Dinas Pertanian dan Kehutanan harus lebih mengawasi pengoptimalan penggunaan dari setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki rasa tanggung jawab yang lebih lagi untuk mengoptimalkan penggunaan dari setiap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini juga di maksudkan agar bantuan bisa diberikan kepada orang yang tepat sehingga tujuan pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat bisa tercapai.
3. Di perlukan ketegasan pemerintah terkait melanjutkan atau memberhentikan program biogas ini sendiri, melihat kenyataan yang terjadi di lapangan bahwa selama 3 tahun, program ini belum mampu untuk mencapai target yang di harapkan.

### **Daftar Pustaka**

- Adi, Isbandi Rukminto. 2007. *Perencanaan partisipatoris berbasis aset dan komunitas, dari pemikiran menuju penerapan*. Jakarta : FISIP UI Press.
- Blair, Harry, "Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries", *World Development*, vol. 28, no 1, 2000
- Bungin, M Burhan, 2013. *Metodologi penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : PT Fajar InterPratama Mandiri
- Culla, Adi Suryadi, 2002. *Masyarakat Madani*. Jakarta : PT RajaGrafindo persada
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti, 2009. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hamidi, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Gaya Media
- Moeliono I, Suaradika P, Sumantri A, Suhardi WB. 1994. *Participatory Rural Appraisal-Berbuat Bersama Berperan Setara*. Bandung: Studio Driya Media
- M. Anwas Oos, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Nasdian FR. 2006. *Pengembangan masyarakat (Community Development)*. Bogor: Departement Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar

- Surya Adisubrata, Winarna, 2002. *Masyarakat Madani*. Yogyakarta : Percetakan AMP YKPN
- Syakrani dan Syahrani, 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sj Sumarto, Hetifah. 2003. *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Wahyuni, Sri. 2013. *Panduan Praktis BIOGAS*. Jakarta : Penerbit : Penebar Swadaya
- Wibowo, Edi. 2004. *Kebijakan Publik Pro Civil Society*. Yogyakarta : Penerbit Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing

### ***Dokumen-Dokumen***

- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan Kegiatan FisiPemanfaatan Energi Baru dan Energi terbarukan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 *Tentang Kebijakan Energi Nasional*
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 *tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)*
- Undang-Undang No 10 Tahun 2004 *Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

### ***Sumber Internet***

- Pengertian Partisipasi, (<http://turindraatp.blogspot.com/2009/06/pengertian-partisipasi>. diakses 16 Februari 2014)
- Tekan Subsidi, PLN Manfaatkan Gas Metana Batubara (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/05/02/2/150872/> Tekan-Subsidi-PLN-Manfaatkan-Gas-Metana-Batubara, diakses 23 Februari 2014)
- Pemanfaatan Gasifikasi Batubara untuk PLTD sistem Dual Fuel, (<http://www.esdm.go.id/berita/44-batubara/1615-pemanfaatan-gasifikasi>, diakses 23 Februari 2014)
- Kurangi Penggunaan Solar, PLN gandeng 2 “Raksasa” sawit, (<http://finance.detik.com/read/2014/01/20/142725/2472263/1034/kurangi-penggunaan-solar-pln-gandeng-2-raksasa-sawit>, diakses 23 februari 2014)